

ANALISIS DAMPAK PROYEK PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERKEBUNAN RAKYAT TERHADAP EKONOMI PERTANIAN DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT BAGIAN UTARA

Impact Analysis of Community Estate Cultivation Project for Farmer and Social Profit in Northern West Lombok Regency

Bambang Dipokusumo

Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan; (1) Menganalisis keuntungan petani (*private profit*) dan keuntungan sosial (*social profit*) dari usahatani mete yang dijalankan oleh Proyek PBPR-ADB/TCSSP; (2) Menghitung kesempatan kerja yang tercipta dari adanya Proyek PBPR-ADB/TCSSP; (3) Menghitung pendapatan petani dan keluarga pada seluruh aktivitas ekonomi yang diciptakan proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Keuntungan petani (*private profit*) dan keuntungan sosial (*social Profit*) per tahun per hektar masing - masing sebesar Rp 2.464.073,- dan Rp 3.441.258,-; (2) Kesempatan kerja pada usahatani terpadu tersebut yaitu 131,08 HKO dengan perincian bahwa kesempatan kerja pada usahatani pangan sebesar 69,96 HKO dan usahatani jambu mete sebesar 61,12 HKO ; (3) Pendapatan rumahtangga petani setahun sebesar Rp 5.990.660,-, dengan proporsi terbesar bersumber dari usahatani pangan (61,47 %), usahatani jambu mete (32,13 %) dan sisanya sebesar 3,40 % bersumber dari usahatani di pekarangan, peternakan, nelayan, dagang dan jasa. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa perluasan pasar mete sangat diperlukan dan pola pelaksanaan Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat dapat dikembangkan pada daerah lainnyadi Propinsi Nusa Tenggara Barat.

ABSTRAK

This research has three objectives; (1) To analysa the private and social profit from the integrated farming system; (2) To know employment opportunities created by the project; (3) To analysa farmer income from all activities that is created by the project. This research found several results; (1) Private profit was Rp. 2.464073,- and social profit was Rp. 3.441.258,-; (2) The project can employ labor in integrated farming system was 131,08 Mandays that was 69,96 Mandays for cheseau farming and 61,96 Mandays for food crop farming ; (3) Farmer household income in a year was Rp 5.990.660,- that was 61,47 % from food crop farming, 32,13 % from cheseau farming dan 3,40 % from other farming. Based on the results of the research, it is suggested that pattern of empowering communities developed by Community Estate Cultivation Project are able to be extended on other dry land in west Nusa Tenggara Province.

Kata Kunci : Dampak, Ekonomi Petani dan Masyarakat

Key Word: : *Impact, Private and Social Profit*

PENDAHULUAN

Pembangunan Pertanian dalam PJP II yang digariskan dalam GBHN 1993 didasarkan pada strategi kebijaksanaan penerapan sistem agribisnis secara terpadu. Pola diversifikasi pertanian untuk mewujudkan pertanian yang modern, efisien dan tangguh, sehingga mampu meningkatkan dan menganekaragamkan hasil pertanian. Tujuan ini dapat dicapai melalui pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif semua potensi sumberdaya pertanian disetiap wilayah, meningkatkan mutu dan menunjang pembangunan wilayah (Kanwil Departemen Pertanian NTB, 1997).

Perhatian pemerintah pada sektor pertanian cukup tinggi mengingat potensi sektor ini, baik dari aspek potensi wilayah maupun tingginya tingkat ketergantungan penduduk dalam sektor pertanian. Angka ketergantungan penduduk pada sektor pertanian, khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang masih tinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto NTB. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB NTB sebesar 38,23 % atau Rp. 1 325 070 673 000,- atas dasar harga berlaku 1995 dan sebesar 36,99 % atau Rp. 1 093 248 936 000,- berdasarkan harga konstan tahun 1993. Selain itu sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak. Berdasarkan Hasil Survei Tenaga Kerja Nasional 1995 tercatat bahwa 61,37 % (1 024 556 orang) dari jumlah angkatan kerja terserap pada sektor pertanian (Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan NTB, 1997).

Luas lahan kering di Kabupaten Lombok Barat yaitu 172 850 hektar atau sekitar 8,73 dari luas Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut : 43346 hektar lahan tegalan dan 42866 hektar lahan ladang (Direktorat Irigasi, 1998). Dalam mengembangkan lahan kering dan meningkatkan ekonomi wilayah tersebut, pemerintah sejak tahun 1979 sampai sekarang secara bertahap memberikan perhatian dalam meningkatkan produktifitas lahan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim dan memperoleh pendapatan pada lahan kering. Namun sejak tahun 1992/1993 Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat telah mengembangkan tanaman jambu mete sebagai komoditi unggulan lahan kering dan dipadukan dengan tanaman *intercropping* berupa tanaman pangan.

Kebijakan pemerintah tersebut direalisasikan dalam bentuk program berupa Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat yang dibiayai oleh *Asian Development Bank* (ADB) yang disingkat dengan Proyek PBPR-ADB. Proyek PBPR-ADB/TCSSP ini dikembangkan dengan konsep

pemberdayaan pada empat sumberdaya yaitu : 1) Sumberdaya manusia, 2) Sumberdaya sosial, 3) Sumberdaya buatan, dan 4) Sumberdaya lahan. Keempat sumberdaya tersebut dipadukan dalam model usahatani terpadu dengan kombinasi tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Tanaman Perkebunan yang dikembangkan adalah Tanaman Jambu Mete, sedangkan tanaman pangan berupa tanaman jagung, kacang tanah, kacang tunggak, kacang panjang, padi gogo dan ubi kayu. Dengan pola pengembangan yang diterapkan oleh Proyek PBPR tersebut, maka tentunya akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi petani dan masyarakat pada lokasi proyek.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu 1). Menganalisis keuntungan petani (private profit) dan keuntungan sosial (social profit) dari usahatani mete yang dijalankan oleh Proyek PBPR-ADB/TCSSP, 2). Mengetahui kesempatan kerja yang tercipta dari adanya Proyek PBPR-ADB/TCSSP, 3). Mengetahui pendapatan petani dan keluarga pada seluruh aktivitas ekonomi yang diciptakan proyek.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan teknik survai yang dilengkapi daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer yang bersumber langsung dari responden dan data sekunder yang bersumber dari informasi lain yang telah ada baik dari instansi pemerintah maupun dari hasil penelitian dan manjalah ilmiah/jurnal penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2001 dengan menggali informasi langsung pada petani peserta proyek dan informasi lainnya dari laporan-laporan proyek dari tahun 1992 dan melakukan estimasi sampai dengan tahun 2002. Lokasi penelitian ini merupakan lokasi Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan Rakyat di Desa Selengan dan Kayangan. Jumlah petani responden sebanyak 57 orang yang ditentukan secara proporsional random sampling yaitu 5 % dari seluruh petani peserta Proyek PBPR di Kabupaten Lombok Barat Bagian Utara.

Penelitian ini menggali informasi melalui beberapa variabel penting sebagai indikator yaitu 1). Biaya input merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam usahatani, seperti biaya input domestik, biaya input transferable; 2). Penerimaan, merupakan hasil perkalian output dengan harganya terdiri dari harga output yang dapat diekspor maupun diimpor, diukur dengan menggunakan harga CIF maupun FOB; 3). . Curahan waktu

kerja diukur dengan menggunakan hari kerja orang (HKO); 4). Pendapatan keluarga diukur dengan menjumlahkan seluruh pendapatan keluarga

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan beberapa alat analisis utama yaitu : 1). Untuk menghitung dampak adanya proyek terhadap ekonomi petani dan masyarakat secara keseluruhan digunakan analisis matriks kebijakan atau ***Policy Analysis Matrix*** . 2). Untuk menganalisis kesempatan kerja pada aktivitas proyek digunakan curahan waktu kerja melalui konversi hari kerja orang atau hari kerja setara pria; 3). Untuk menghitung pendapatan keluarga petani secara keseluruhan dari aktivitas proyek digunakan analisis biaya dan pendapatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuntungan Petani dan Sosial

Usahatani jambu mete yang dikembangkan oleh petani melalui Proyek PBPR-ADB/TCSSP memberikan nilai keuntungan sosial (*social profit*) lebih tinggi daripada keuntungan yang diperoleh petani (*privat profit*). Lebih besarnya keuntungan sosial dibanding keuntungan privat menyebabkan nilai efek differgensi yang negatif. Keadaan tersebut terjadi sebagai akibat dari kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan kebijakan pemerintah (*government failure*) yang mempunyai keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan adanya pengembangan usahatani jambu mete. Nilai keuntungan petani, keuntungan sosial dan nilai efek differgensi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil ***Analisis Policy Analisis Matrix (PAM)*** Pada Usahatani Mete pada Daerah Penelitian Periode Tahun 1992 - Tahun 2006.

No	Uraian	Revenue (Rp)	Cost (Rp)		Profit (Rp)
			Tradable input	Domestic Factor	
1.	Privates Prices	3.567.490	42.275	1.061.143	2.464.073
2.	Social Prices	5.313.232	48.737	1.823.237	3.441.258
3.	Divergences Effect	-1.745.742	-6.462	-762.049	-977.185

Sumber. Analisis Data Primer

Tabel 1, menunjukkan bahwa nilai keuntungan petani dari usaha jambu mete sebesar Rp.2464.073,- dan keuntungan sosial sebesar Rp.3.441.258,-. Perbedaan besarnya keuntungan petani dan keuntungan sosial disebabkan karena perbedaan penerimaan sebagai perbedaan harga dari output. Kemudian disebabkan pula oleh perbedaan biaya dari input yang diperdagangkan (*tradable input*) dan input yang tidak diperdagangkan (*domestic factor*) antar negara. Perbedaan tersebut menghasilkan nilai efek divergensi bersih menjadi -Rp. 977.185,-.

Bekerjanya pasar dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan usaha pengembangan usahatani jambu mete secara langsung terlihat pada nilai efek divergensi yang diperoleh. Nilai efek divergensi bersih memberikan makna petani masih belum mampu menarik kelebihan keuntungan yang diterima oleh sosial (masyarakat). Ketidakkampuan petani mentransfer keuntungan sosial tersebut sebagai dampak dari kegagalan pasar dan kebijakan pemerintah. Nilai yang tidak dapat ditransfer ke petani sebagai akibat kegagalan pasar merupakan perbedaan nilai output yang diterima petani dan sosial (*transfer output*) sebesar Rp.1.745.742,-. Sementara itu, dampak kebijakan ekonomi wilayah ditunjukkan oleh nilai transfer input dari input yang diperdagangkan sebesar -Rp.6.462,- dan kebijakan pemerintah dalam menentukan upah tenaga kerja (*domestic factor*) sebesar -Rp.762.095,-.

Dampak kebijakan pemerintah terlihat dari nilai transfer input negatif untuk input yang diperdagangkan memberikan makna bahwa petani memperoleh subsidi terhadap input yang digunakan seperti Pupuk Urea, TSP, dan KCl. Besarnya subsidi yang diterima petani sebesar Rp.6.462,- dan nilai koefisien rasio subsidi terhadap produsen sebesar 0,18392. Nilai rasio subsidi produsen tersebut memberikan makna, bahwa setiap nilai Rp.1000,- yang ditanamkan untuk pembelian sarana produksi seperti pupuk, maka petani menerima subsidi sebesar Rp.184,-. Sementara itu, nilai ***domestic factor*** yang negatif memberikan makna bahwa petani membayar tenaga kerja dibawah tingkat upah yang telah ditentukan pemerintah (UMR).

Kegagalan pasar mentransfer harga jambu mete ke tingkat petani sebagai akibat tersebarannya usahatani jambu mete, sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan tertentu dalam memasarkan produksi. Kelembagaan yang muncul adalah pedagang-pedagang pengumpul dari tingkat desa sampai dengan kecamatan dan pedagang antar pulau serta eksportir tingkat kota. Selain itu karena tersebarnya usahatani jambu mete, masih ada faktor lain seperti sifat produksi jambu mete yang tidak kontinyu, sehingga memerlukan suatu kelembagaan tertentu pula. Munculnya kelembagaan pemasaran tersebut merupakan implikasi dari ketidaksempurnaan informasi (***asimetric information***). Dampak bekerjanya pasar dan adanya kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usahatani jambu mete ditunjukkan pula oleh rendahnya nilai koefisien keuntungan (kurang dari satu) yaitu sebesar 0,71603. Artinya, bahwa petani hanya mampu menarik keuntungan sebesar 71,60 persen dari keuntungan yang sebenarnya. Masih ada peluang bagi petani untuk dapat menarik keuntungan sebesar 28,40 persen bila kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dapat diatasi. Bila diperhatikan dari besarnya nilai dari nilai transfer input dan transfer output serta koefisien rasio subsidi produsen, maka ketidakmampuan petani dalam mentransfer keuntungan sosial untuk masuk sebagai keuntungan petani, lebih dominan ditentukan oleh kegagalan pasar (*market failure*) dan bukan karena kegagalan kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari negatif dan besarnya nilai *transfer output* yaitu Rp.1.745.742,-. Sementara itu nilai rasio subsidi produsen (0,1839) yang lebih rendah dari nilai rasio biaya *private* yaitu 0,3010.

Keunggulan komparatif dari pengembangan usahatani pada daerah penelitian dapat dilihat dari besar nilai proteksi nominal input dan output (NPCI dan NPCO), koefisien proteksi efektif (EPC), dan nilai hasil biaya sumberdaya domestik (DRC). Nilai keempat koefisien tersebut dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini:

Tabel 2. Nilai Koefisien Proteksi Nominal Input dan Output, Proteksi Efektif dan Rasio Biaya Sumberdaya Domestik Pada Usahatani Jambu Mete Pada Daerah Penelitian Tahun 1992 - Tahun 2006.

No	Uraian	Nilai
1.	Koefisien Proteksi Nominal	
	a. Input (NPCI)	0,8674
	b. Output (NPCO)	0,6714
2.	Koefisien Proteksi Efektif (EPC)	0,6696
3.	Koefisien Rasio Sumber Daya Domestik (DRC)	0,3462

Sumber. Analisis Data Primer

Tabel 2. menunjukkan bahwa diantara keempat koefisien tersebut ternyata mempunyai nilai kurang dari satu dan positif. Nilai koefisien proteksi

input nominal (NPCI) yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu 0,8674, kemudian diikuti oleh koefisien proteksi output (NPCO) sebesar 0,6714, Nilai koefisien proteksi efektif (EPC) sebesar 0,6696 dan yang terkecil adalah nilai koefisien rasio sumber daya domestik (DRC) sebesar 0,3462.

Nilai koefisien rasio sumber daya domestik (*Domestic Resources Coefficient*) sebesar 0,3462 memberikan indikasi bahwa usahatani jambu mete mempunyai keunggulan komparatif untuk dikembangkan di daerah penelitian. Hal ini dikarenakan nilai DRC yang diperoleh memberikan hasil yang menjauhi nilai satu. Semakin jauh nilai DRC dari satu memberikan gambaran lebih efisiennya penggunaan sumberdaya di dalam negeri untuk mengembangkan usahatani jambu mete. Makna lain dari DRC sebesar 0,3462 adalah dengan memproduksi kacang mete didalam negeri (di daerah penelitian), maka kita dapat lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sebesar 65,38 persen bila dibandingkan bila kita mengekspor kacang mete dari luar negeri. Keunggulan komparatif dalam mengembangkan usahatani jambu mete karena didukung oleh adanya kebijakan pemerintah dalam subsidi terhadap input yang dapat diperdagangkan (pupuk). Nilai NPCI sebesar 0.8674 memberikan makna bahwa petani mendapat subsidi terhadap biaya input yang sebesar 13,26 persen. Subsidi yang diberikan pemerintah melalui penurunan harga input dapat menjadi insentif bagi petani dalam mengembangkan usahatani jambu mete.

Nilai koefisien proteksi nominal output (NPCO) sebesar 0,6714 juga memberikan indikasi keunggulan komparatif untuk mengembangkan usahatani jambu mete pada daerah penelitian. petani hanya mampu mencapai harga output dunia atau *shadow prices* (harga sosial berdasarkan harga FOB) sebesar 67,14 persen. Masih tingginya harga bayangan yang melebihi harga ditingkat petani (*farm gate prices*) merupakan insentif bagi petani dalam mengembangkan usahatani jambu mete. Petani masih mempunyai peluang untuk dapat memperoleh tingkat harga yang lebih baik.

Nilai koefisien efektif (EPC) sebesar 0,6696 memberikan arti bahwa secara keseluruhan petani memperoleh insentif yang negatif yaitu subsidi pada *tradable input* masih lebih rendah dibandingkan pajak yang dikenakan kepada petani, sehingga secara keseluruhan menyebabkan nilai kurang dari satu. Namun keadaan tersebut tidak sampai menyebabkan petani menjadi rugi, karena petani dapat mengimbangi kehilangan tersebut melalui penekanan upah tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio biaya private yang rendah yaitu 0,3010.

Kesempatan Kerja Pada Usahatani Terpadu Lahan Kering.

Pemberdayaan masyarakat lahan kering menggunakan pendekatan usahatani terpadu oleh proyek PBPR-ADB/TCSSP tidak hanya berdampak pada pendapatan petani lahan kering tetapi juga berdampak luas terhadap kesempatan kerja untuk masyarakat sekitarnya, terutama keluarga petani lahan kering itu sendiri. Kesempatan kerja yang dihasilkan dari pengembangan usahatani terpadu sebesar 131.08 HKO yang bersumber dari kesempatan pada usahatani pangan yaitu 69,96 HKO (53,37%) dan usahatani mete sebesar 61,12 HKO bila diperhitungkan dari kegiatan awal. Secara rinci kesempatan kerja pada usahatani terpadu dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini.

Tabel 3. Kesempatan Kerja Pada Berbagai Sistem Penanaman dan Jenis Kegiatan Usahatani Pangan pada Daerah Penelitian Tahun 2000.

No	Sistem Penanaman	Peng. Lahan	Tanam	Pemu-pukan	Penyi-angan	Pemb.H /P	Panen	Total HKO
1.	Monokultur Jagung	23,24	16,66	6,97	4,25	0	7,04	58,36
2.	Monokultur Kacang Tanah	34,28	19,71	1,42	5,17	0	9,85	70,43
3.	Jagung + Kacang Tanah	30,12	22,31	5,63	4,93	0	8,93	71,92
4.	Jagung + Kacang Panjang	24,35	22,61	8,74	5,25	0	7,84	68,79
5.	Jagung + Ubi Kayu	28,24	22,33	9,55	6,13	0	12,31	78,56
6.	Jagung + Padi	25,48	17,07	9,01	4,5	0,13	8,23	65,42
7.	Kacang Tanah + Kcg. Ijo	26,59	20,55	2,91	4,89	0	10,95	65,89
8.	Padi + Kacang Antap	34,27	19,64	5,95	4,83	0,59	14,99	80,27
Total		226,8	161,9	50,18	39,95	0,72	80,14	559,6
Rata-rata per Ha		28,35	20,24	6,27	4,99	0,09	10,02	69,96

Sumber. Analisis Data Primer

Tabel 4. Kesempatan Kerja Pada Usahatani Jambu Mete per Hektar Lahan Pada Daerah Penelitian Tahun 2000.

No.	Kegiatan Usahatani	Kesempatan Kerja (HKO)
1.	Pembukaan Lahan	21,90
2.	Pembuatan Lubang dan Pengajiran	38,31
3.	Penanaman	8,65
4.	Pemupukan	9,05
5.	Penyiangan	3,71
6.	Pemberantasan Hama dan Penyakit	1,43
7.	Panen	52,09
8.	Pengeringan	9,03
Total		144,18

Sumber. Analisis Data Primer

Bekerjanya petani sebagai buruh tani sesungguhnya bukan tuntutan ekonomi semata tetapi juga merupakan tuntutan sosial, dimana lahan kering hampir selalu kelangkaan tenaga kerja. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, maka setiap rumah tangga menyadari hal tersebut dan bersedia untuk bekerja pada usahatani orang lain sebagai buruh tani. Berdasarkan informasi yang ada, apabila petani ketahuan tidak berpartisipasi pada kegiatan usahatani orang lain, maka bila dalam melaksanakan usahatannya sendiri akan menghadapi kesulitan tenaga kerja.

Pola kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat petani lahan kering tersebut, diduga muncul dari rasa senasib yang pernah dialami hidup pada lahan kering sebelum adanya Proyek PBPR-ADB/TCSSP. Kehidupan awal petani peserta proyek hanya tergantung pada usahatani ubi kayu dan pekerjaan jasa-jasa lainnya seperti buruh tani, buruh pasar dan buruh bangunan. Kekuatan ikatan sosial karena rasa senasib dalam kehidupan sehari-hari masih nampak dengan terbentuknya kelompok gotong-royong yang termodifikasi melalui pengupahan.

Sumber dan Pendapatan Rumahtangga Petani

Sumber pendapatan petani responden bukan hanya berasal dari dalam usahatani sendiri, namun pendapatan rumahtangga juga bersumber dari usahatani orang lain sebagai buruh tani, nelayan, dagang dan ojek serta buruh bangunan. Besarnya pendapatan usahatani dan dari luar usahatani tersebut bervariasi tergantung dari luas lahan yang dikuasai dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga rumahtangga petani tersebut. Sumber dan besarnya pendapatan rumahtangga petani dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5. Sumber dan Pendapatan Rumahtangga Petani Responden di Daerah Penelitian Tahun 2000

No.	Sumber Pendapatan	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1.	Lahan Usahatani Sendiri		
	a. Usahatani Pangan	3.682.710	61,47
	b. Usahatani Mete	1.924.904	32,13
2.	Luar Usahatani Sendiri		
	a. Pekarangan	20.800	0,35
	b. Buruh Tani	160.877	2,9
3.	Ternak	14.000	0,23
4.	Nelayan	144.737	2,42
5.	Dagang dan Jasa Lainnya	42.632	0,71
Total		5.990.660	100,00

Sumber Analisis Data Primer

Dari Tabel 5 memperlihatkan bahwa petani dan anggota keluarga mempunyai pekerjaan sampingan selain dari usahatani sendiri yaitu sebagai buruh tani, nelayan, beternak dan dagang termasuk buruh bangunan dan jasa ojek. Jenis pekerjaan buruh tani merupakan pekerjaan sampingan dominan dilakukan oleh rumahtangga yaitu sejumlah 52 rumahtangga petani ada anggota keluarganya bekerja sebagai buruh tani, kemudian diikuti oleh nelayan yaitu sebanyak 17 rumahtangga, rumahtangga yang beternak sejumlah 10 rumahtangga dan dagang serta jasa lainnya sejumlah 6 rumahtangga.

Bila dikaji dari besarnya pendapatan rumahtangga petani selama setahun, maka sumber pendapatan utama yaitu berasal dari usahatani terpadu pangan dan jambu mete sebesar Rp. 5.607.614,- (93,6 %) dan diikuti oleh sumber pendapatan lainnya yaitu buruh tani sebesar Rp. 160.877,- (2,69%), nelayan sebesar Rp.144.737,-(2,42%), dagang dan jasa lainnya sebesar Rp. 42.632,- (0,71%) dan sumber pendapatan terendah adalah berternak sebesar Rp. 14.000 (0,23%). Sumber lain pendapatan rumahtangga petani yaitu dari tanaman pekarangan dengan jumlah Rp. 20.800 (0,35%) dari total pendapatan rumah tangga.

Adanya kegiatan nelayan yang dilakukan oleh anggota keluarga rumahtangga petani, karena lokasi pemukiman yang berdekatan dengan pantai. Pekerjaan nelayan tersebut hanya dilakukan pada saat musim hujan, karena petani nelayan tersebut merupakan nelayan kecil yang hanya mengandalkan peralatan perahu layar berkemampuan rendah, jaring dan pancing. Pekerjaan dagang dilakukan oleh anggota keluarga petani hanya pedagang mingguan, artinya kegiatan tersebut hanya dilakukan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari Kamis. Kemudian jasa ojek umumnya dilakukan oleh anggota keluarga (anak) dimana kegiatan ini juga tidak rutin dilakukan. Untuk kegiatan buruh bangunan (hanya satu rumahtangga) dilakukan di dalam desa yaitu membangun rumah petani peserta proyek. Meskipun banyak rumahtangga yang mengusahakan ternak, namun bukan merupakan sumber pendapatan rutin setiap tahunnya, karena belum tentu setiap tahun petani menjual ternaknya.

Pendapatan perkapita diperoleh dari total pendapatan rumahtangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya yang sering digunakan adalah kebutuhan konsumsi kalori pertahun. Sajogyo (1983) telah mengkaitkan kebutuhan konsumsi kalori yang disetarakan dengan konsumsi beras. Klasifikasi tingkat kesejahteraan berdasarkan kebutuhan setara beras sebagai berikut : (1). Rumahtangga tergolong tidak miskin, bila dapat mengkonsumsi 320 Kg setara beras perkapita pertahun, (2). Rumahtangga tergolong hampir miskin bila mengkonsumsi setara beras antara 320 Kg sampai dengan 250 Kg perkapita pertahun, dan (3). Rumahtangga tergolong miskin jika mengkonsumsi kurang dari 250 Kg beras perkapita pertahun.

Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan pertahun rumah tangga petani peserta proyek yang diperoleh dari usahatani terpadu jambu mete dan pangan serta pendapatan lainnya sebesar Rp. 5.990.660,-. Kemudian rata-rata jumlah anggota keluarga dalam setiap rumah tangga yang berjumlah lima orang, maka diperoleh pendapatan perkapita pertahun sebesar Rp. 1.198.132,-. Dari nilai pendapatan perkapita tersebut maka rumahtangga petani tergolong kategori tidak miskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Proyek Budidaya Perkebunan Rakyat (PBPR-ADB/TCSSP) memberikan dampak terhadap ekonomi petani dan masyarakat yang terlihat dari nilai keuntungan petani (*privat profit*) dan keuntungan sosial (*social profit*). Masing-masing sebesar Rp. 2.464.073,- dan Rp.3.441.258,-.
2. Proyek Budidaya Perkebunan Rakyat (PBPR-ADB/TCSSP) memberikan dampak terhadap kesempatan kerja pada kegiatan usahatani pangan dan usahatani mete. Kesempatan kerja pada usahatani terpadu tersebut yaitu 131,08 HKO dengan perincian bahwa kesempatan kerja pada usahatani pangan sebesar 69,96 HKO dan usahatani jambu mete sebesar 61,12 HKO.
3. Pendapatan rumahtangga petani selama setahun dari berbagai sumber pekerjaan yaitu sebesar Rp. 5.990.660,-, dengan proporsi terbesar bersumber dari usahatani pangan sebesar Rp. 3.682.710,- (61,47 %), usahatani jambu mete sebesar Rp. 1.924.904,- (32,13 %) dan sisanya sebesar 3,40 % bersumber dari usahatani pekarangan, peternakan, nelayan, dagang dan jasa.
4. Tingkat kesejahteraan rumahtangga petani tergolong dalam katagori tidak miskin dengan nilai pendapatan per kapita Rp. 1.198.132,- (katagori tidak miskin bila pendapatan per kapita lebih besar sama dengan Rp. 480.000,- per tahun)

Saran

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pemasaran khususnya produk mete (mete gelondongan dan kacang mete) terjadi distorsi atau kegagalan pasar yang disebabkan oleh struktur pasar yang oligopoli sehingga kekuatan penentuan harga masih terdapat pada pedagang dan posisi produsen (petani) sangat lemah. Kegagalan pasar tersebut terjadi juga disebabkan karena lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengembangan usahatani dimana lebih terkonsentrasi pada perluasan areal dan belum menyentuh pada kebijakan pemasaran hasil produksi. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan kebijakan pemerintah dalam perluasan pasar artinya lebih membuka peluang perusahaan lain untuk memasuki pasar mete melalui ekspor produk mete di luar Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dipelopori oleh Dinas Prindustrian dan Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perkebunan Propinsi NTB, 1998. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sumberdaya Alam di Lahan Kering Dengan Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 1998/1999*. Mataram.
- Dinas Perkebunan Propinsi NTB, 2000. *Statistik Perkebunan Propinsi NTB Tahun 2000*.
- Djamin, Z., 1993. *Perencanaan dan Analisa Proyek Edisi Dua*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ethridge, Don, 1995. *Research Methodology in Applied. Economics and Conducting Economics Research*. IOWA State University Press/Ames.
- Gittinger, J. Price, 1986. *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Edisi Dua*. Universitas Indonesia Press-Johns Hopkins. Seri Edisi Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta.
- Karla Hoff, et. al., 1993. *The Economics of Rural Organization*. Oxford University Press Inc. New York.
- Monke, Eric A. dan Scott R. Pearson, 1989. *The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development*. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Sridodo, et all., 1988. *Penelitian Sistem Usahatani dan Kapas. Review Program Sandubaya. Proyek Pembangunan Penelitian Pertanian Nusa Tenggara*. Badan Litbang Pertanian Jakarta.
- Winoto, Joyo, 1997. *Pedoman Pewilayahan Komoditas Pertanian. Kerangka Pemikiran, Maksud dan Tujuan*. Materi Kuliah Sistem Perencanaan Ekonomi Wilayah Program Studi PWD PPs IPB. Bogor.